

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kampar)**

Oleh:

Dewi Puspita Sonia

Pembimbing: Vince Ratnawati dan Yuneita Anisma

Faculty Of Economic University Riau, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : dewipuspitasonia@gmail.com

*The Effect Of Human Resource Capacity, Utulization Of Information Technology
and Government Iternal Control Systems On Financial Reporting Information
Value (Emperical Study In SKPD Kampar Regency)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of Human Resource Capacity, Utilization of Information Technology, and Government Internal Control System Against Financial Reporting Information Value (Empirical Study in SKPD KamparRegency). The location of object in this research is SKPD Kampar Regency. While the timing of this study was October 2015. The population in this study were all SKPD in Kampar Regency, which amounted 33 SKPD. The sampling used was purposive sampling. Data collection technique used by the author in this study consisted of field research and literature. Methods of analysis using multiple linear regression analysis. The results showed that Human Resources Capacity, Information Technology Utilization, and Government Internal Control System affect the value of Financial Reporting Information. Based on the calculation, the value of determination coefficient of 0.440. This shows that the variable Human Resources Capacity, Information Technology Utilization, Government Internal Control System gives the effect of 44.00% of the value of financial reporting information. The remains of 66.00% influenced by other variables that are not included in this study.

Keywords: Human Resource Capacity, Utilization of Information Technology, Government Internal Control System and Financial Reporting Information Value

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi sektor publik pada saat ini menuntut banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut Suwardjono, 2005. Informasi yang dipublikasikan harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai

nilai. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari perhatian para pemilik kepentingan terhadap akuntabilitas lembaga lembaga publik, baik dipusat maupun daerah.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006)

Laporan keuangan mempunyai tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan juga harus memberikan informasi yang bermanfaat.

Oleh karena itu, informasi yang diberikan harus bersifat informatif dan terbuka atas semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan maka laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang dapat mendukung tingkat kualitas nilai informasi yang terdapat didalamnya.

Agar informasi dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan bisa dipahami oleh para pemakai, informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, dengan adanya sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, diharapkan laporan keuangan yang akan dihasilkan dapat diandalkan dengan artian bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi.

Faktor kedua yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah Pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat sehingga dengan perkembangan teknologi ini pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

Seperti kita ketahui bahwa total volume anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan

volume transaksi yang semakin besar dan kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002).

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil

di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak kekurangan. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah dari beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Riau masih banyak disajikan data – data yang tidak sesuai. BPK perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintahan Kabupaten Kampar TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2013 dikemas dalam tiga buku. Buku 1 adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar dan opini atas laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pada tanggal 28 Mei 2014, BPK RI menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmanto kepada ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, S. Ag, dan penyerahan dilaksanakan di ruang rapat kantor perwakilan dan disaksikan oleh pejabat lainnya.

Pada buku II BPK RI menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan pada permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK RI berharap agar hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013 tersebut

dapat ditidaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kampar sesuai ketentuan pasal 8 ayat 2 UU No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan yang menyatakan bahwa tidak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh bupati kepada BPK RI.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andra, Herwati dan Yunilma (2014). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan 1 variabel lagi sebagai perluasan penelitian

Adapun masalah yang akan di uji dalam penelitian ini adalah 1) Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 1) Bukti empiris bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. 2) Bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. 3) Bukti empiris bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pihak pihak yang berkepentingan, yaitu : 1) Bagi instansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. 2) Bagi perusahaan. Menyediakan informasi mengenai pentingnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Nilai Informasi

Menurut suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut (Indriasari dan Ertambang, 2008).

Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah mempunyai karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang membuat laporan keuangan memiliki nilai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu : 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan

keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4) Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di pahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Menurut Suwardjono (2006:155) keterbatasan dalam informasi pelaporan keuangan adalah 1) Lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. 2) Lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan (approximation) dari pada hasil perhitungan yang pasti. 3) Sebagian besar merefleksikan pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. 4) Hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. 5) Penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos (cost) sehingga pertimbangan kos-manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan

sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam Statement Offinancial Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan. ada perbedaan dalam pengertian pelaporan keuangan (financial reporting) dan laporan keuangan (financial report). Pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek yang berkaitan ddengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi.

Salah satu cara yang di gunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan dalam satu tahun buku yang bersangkutan

Laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi

fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (ouput) dan hasil-hasil (outcomes).

Tanggung jawab dapat dilihat atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Desi dan Ertambang, 2008). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan dimasa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk memvalidasi alat pemilihan, mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi, dan menentukan kebutuhann akan pelatihan.

Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan

teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi (Williams dan Sawyer 2007:4). Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*) electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson dalam enjelina 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam PP No 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian intern

pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah meliputi: 1) Lingkungan Pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 2) Penilaian Risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 3) Kegiatan Pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. 4) Informasi dan Komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan

pengendalian dan tanggungjawabnya. 5) Pemantauan Pengendalian Intern. Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidu lainnya.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu membuat laporan keuangan,

karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dengan baik dan sesuai dengan bidangnya sehingga pelaporan penyajian pelaporan keuangan bisa tepat waktu

Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan Nilai Informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₁ : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyajian pelaporan keuangan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan meminimalisir terjadinya kesalahan serta biaya pemrosesan lebih rendah. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat.

Hasil penelitian Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih

kurang. Banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan.

Agar dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, seharusnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Inilah yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintahan belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan Nilai Informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Dalam PP no 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan.

Saat ini LKPD untuk kabupaten Kampar masih mendapatkan opini WDP (2013). Berdasarkan kenyataan

tersebut masih sangat diperlukan pengendalian intern pemerintah, khususnya kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih bernilai. Sehingga sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini akan direncanakan Oktober 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar, yang berjumlah 33 SKPD, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 18 Dinas, 1 Inspektorat, 8 Badan, 4 Kantor. Penarikan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Dalam menentukan jumlah sampel penulis sangat bergantung pada populasi yang ada. Sebagian mengatakan apabila populasi kurang dari 100, maka sebaiknya semuanya menjadi sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dan instansi pemerintah yang terkait di Kabupaten Kampar yang

berjumlah 33 unit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kuantitatif yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran mengenai data atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi yang diselidiki peneliti dan objek yang diteliti terpisah. Proses penelitian dilakukan melalui pengukuran dengan bantuan alat yang baku dan objektif. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan penjelasan dengan cara melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena tertentu dan menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan tes statistik.

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Nilai informasi pelaporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akutansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur baik

dengan indikator yaitu (1) Pemahaman terhadap peraturan dan standar, (2) Interaksi dengan sistem, (3) Kontrol terhadap SDM, (4) Pendidikan dan training.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (wilkinson dalam enjelina 2014). Beberapa indikator pada teknologi informasi dapat dilihat dengan adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Unsur-unsur Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern.

Metode Analisis Data

Sebuah data yang dapat dianggap valid dan reliabel, maka

langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS versi 21. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus statiska.

Metode analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) terhadap variabel dependen Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y) dengan menggunakan model sebagai berikut

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Y = Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

e = Standar Error

Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ketiga ini, uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata-rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikan alfa (α) sebesar 5% dan degree of freedom (df) + n - k. Sedangkan kriteria uji t adalah : $t_{hitung} > t_{tabel}$, $p_{value} <$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa variabel independen (sistem

pengendalian intern pemerintah) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (nilai informasi pelaporan keuangan). Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel} < P_{value}$ maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, bearti bahwa variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (nilai informasi pelaporan keuangan).

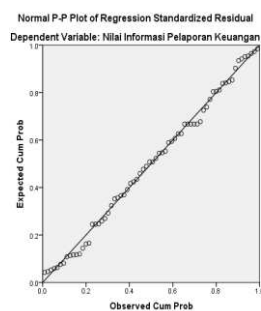
HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1



Sumber : data olahan 2015

Berdasarkan gambar Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperkuat uji normalitas, maka peneliti menguji lagi dengan menggunakan analisis statistik non-paramerik. Komorgorov-Smirnov (K-S). Nilai dari hasil uji ini adalah $< 0,05$ bearti tidak normalitas, tetapi apabila $> 0,05$ maka dapat dikatakan normalitas. Dan hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	68

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.15070575
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.066
	Negative	-.044
Kolmogorov-Smirnov Z		.541
Asymp. Sig. (2-tailed)		.931

Sumber : data olahan 2015

Berdasarkan dapat dilihat nilai Asymp. Sig. $0,931 > 0,05$ yang artinya bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance untuk seluruh variabel independen $> 0,10$ dan untuk $VIF < 10$, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2
nilai VIF dan Tolerance

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.798	1.253
Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem	.526	1.901
Pengendalian Intern	.491	2.035

Sumber : Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, dari semua variabel tersebut semua nilai Toleransi berada diatas atau > 0.1 dan nilai VIF dibawah atau < 10 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Menurut Yusbar (2010) batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka

Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2

Tabel 3
Pengujian Autokorelasi

Model	durbin Watson
1	1.929

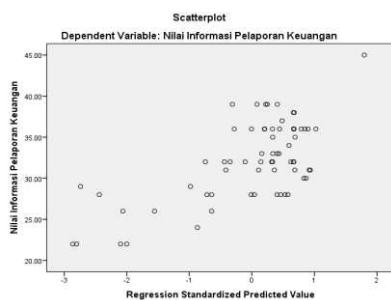
Sumber : Data olahan 2015

Hasil uji Durbin Watson menunjukkan angka 1,929 untuk dependen bearti Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2. Dengan demikian tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada atau tidak heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar Scatterplot model tersebut. Jika membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas (Prastito, 2004: 155).

Gambar 2



Sumber : data olahan 2015

Dari grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas , serta tersebar diatas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan model regresi linear berganda (*Multiple regression*).

Tabel berikut ini akan memperlihatkan hasil dari perhitungan untuk analisis regresi.

Tabel 4
Persamaan Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Thit	Tsig
Konstanta	12.019		
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.184	2.039	.046
Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern (X3)	.244	2.602	.011
	.202	2.199	.032

Sumber : Data Olahan 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 12.019 + 0.184X_1 + 0.244X_2 + 0.202X_3$$

Hasil Pengujian Secara Parsial Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Jika nilai t hitung > t tabel dan p value (sign) < dari 0,05 maka Ha diterima, sebaliknya apabila t hitung < tabel p value (sign) > 0.05 maka Ha ditolak. dapat dilihat hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar 2,039 dan t tabel sebesar 1,980 sementara tingkat signifikansi sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung (t tabel dan p

value(sign) > α . Dengan demikian berarti kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Koefisien regresi untuk kapasitas sumber daya manusia yaitu 0,184.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Jika nilai t hitung > t tabel dan p value (sign) < dari 0,05 maka H_0 diterima, sebaliknya apabila t hitung < tabel p value (sign) > 0.05 maka H_0 ditolak. dapat dilihat dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 2,602 dan t tabel sebesar 1,980 sementara tingkat signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan p value (sign) < α . Dengan demikian berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. koefisien regresi untuk pemanfaatan teknologi informasi yaitu 0,244

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Jika nilai t hitung > t tabel dan p value (sign) < dari 0,05 maka H_0 diterima, sebaliknya apabila t hitung < tabel p value (sign) > 0.05 maka H_0 ditolak. dapat dilihat hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel sistem pengendalian intern sebesar 2,199 dan t tabel sebesar 1,980 sementara tingkat signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan p value(sign) < α . Dengan demikian sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi

pelaporan keuangan daerah. Koefisien regresi untuk sistem pengendalian intern pemerintah yaitu 0,202.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial, biasanya digunakan *Adjusted R square*. Berikut penjelasan mengenai Koefisien Determinasi.

Hasil Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Adjusted R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.682 ^a	.465	.440

Sumber : Data olahan 2015

Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh nilai sebesar 0,440. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern , Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi memeberikan pengaruh 44,00% terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sedangkan sisanya sebesar 66,00 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. dimana semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula laporan keuangan yang

dihasilkan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. dengan memanfaatkan teknologi dengan benar maka dapat membantu dan menghasilkan laporan keuangan yang handal. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang handal maka komponen pengendalian sangat diperlukan.

SARAN

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya adalah penelitian selanjutnya agar bisa memperluas objek penelitiannya sehingga hasil penelitiannya lebih optimal serta diharapkan untuk dapat memandu para responden untuk mengisi ataupun menjawab kuisisioner. Dan meluangkan waktu untuk memantau kuisisioner kembali, agar mengurangi kuisisioner yang diabaikan atau yang sembarang diisi oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Andra, Herawati & Yunilma 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang
- Celviana Winidyaningrum, Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.

- Desi Indriasari, Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Akuntansi*
- Faristina Rosalin. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeless Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang*
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Penerbit UNDIP
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspetasi Kinerja, Ekspetasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM*
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Pengendalian
Intern Terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan

<http://www.bpk.go.id/web/files/2009/07/270609-aidinil-zetra.pdf>

Mardiasmo. 2006. Perwujudan
Transparansi dan Akuntabilitas
Publik Melalui Akuntansi Sektor
Publik: Suatu Sarana *Good
Governance*. *Jurnal Akuntansi
Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal 1-
17.

Peraturan pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 71 tahun 2010 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi :
Perekayasa Pelaporan
Keuangan. Edisi III penerbit
BPFE Yogyakarta

Tuasikal, A 2007. Pengurus
Pemahaman Sistem Akuntansi,
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terhadap Kinerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (Studi pada
Kabupaten Maluku Tengah di
Provinsi Maluku). *Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Sektor
Publik Vol. 08 no..01,pp.1466-
148*

Wilkinson, W. Joseph, Michael J.
Cerullo

Zetra, Aidinil. 2009. Strategi
Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Pemerintah Daerah dalam
Mewujudkan Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan daerah. Skripsi.
Melalui